

WARISAN PEMIKIRAN MUBYARTO: SEBUAH PENGANTAR

Awan Santosa, S.E., M.Sc
Direktur Mubyarto Institute

Mubyarto yang lahir dan dibesarkan dalam suasana perdesaan yang kental telah meninggalkan jejak pemikiran ekonomi berorientasi rakyat kecil yang khas bagi bangsa Indonesia. Pun perhatiannya yang begitu besar terhadap konstitusi telah menempatkannya sebagai penerus pemikiran dan cita-cita ekonomi para pendiri bangsa. Berpegang erat pada ideologi bangsa, namun tetap berpijak pada kenyataan ekonomi yang hidup sehari-hari, demikian kiranya watak pemikiran ekonomi khas Mubyarto.

Dalam pandangan Mubyarto, sistem ekonomi Indonesia haruslah mengacu pada konstitusi dan ideologi bangsa. Inilah yang mendorongnya untuk berjuang keras mengembangkan konsep Sistem Ekonomi Pancasila. Menurutnya, sila pertama Pancasila (Ketuhanan) dan kedua (Kemanusiaan) sebagai “dasar-nya”, sila ketiga (Nasionalisme) dan keempat (Kerakyatan) sebagai “cara penerapannya”, dan sila kelima (Keadilan Sosial) sebagai “tujuannya”.

Sistem ekonomi berdasar pada amanat dan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan Negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, bagaimana menerjemahkan amanat tersebut ke tataran operasional melalui pembuatan regulasi (Undang-undang) dan kebijakan ekonomi itulah warisan perjuangan para pendiri bangsa.

Mubyarto berpandangan bahwa pemerintah haruslah memiliki “keberpihakan” yang jelas kepada ekonomi rakyat, khususnya pertanian rakyat sebagai pelaku ekonomi mayoritas di Indonesia. Dalam pada itu Mubyarto mengembangkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1993 sebagai salah satu karya orisinal anak bangsa untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat di perdesaan.

Mubyarto pun menyayangkan betapa sistem, struktur, dan kebijakan ekonomi telah jauh menyimpang dari ideologi dan amanat konstitusi, di mana yang justru ditumbuh-kembangkan adalah pemodal besar dan bukannya ekonomi rakyat. Oleh karenanya, Mubyarto menyerukan agenda bangsa yang mendesak untuk dilakukan, yaitu “Revolusi Sistem Ekonomi”, dengan kembali ke Pancasila dan UUD 1945, khususnya kembali ke Pasal 33.

Dalam pada itu, Mubyarto berjuang gigih melawan upaya penghapusan Pasal 33 UUD 1945 oleh ekonom-ekonom arus-utama, sampai beliau memutuskan mundur dari posisinya sebagai Ketua Tim Ahli Ekonomi PAH I-BP MPR RI bersama Dawam Rahardjo. Upaya ini berhasil mempertahankan Pasal 33 ayat 1-3, tetapi tetap tidak sanggup menahan laju kencang liberalisasi dengan dihapuskannya Penjelasan Pasal 33 yang berisi cita-cita Indonesia berkoperasi, demokrasi ekonomi, dan peringatan sejarah akan bahaya privatisasi, yang tidak tergantikan dengan penambahan ayat 4 dalam pasal tersebut.

Penyimpangan sistem ekonomi nasional tersebut menurutnya adalah karena keterjebakan ekonomi Indonesia pada perangkap “globalisme-ekonomi”. Mubyarto memandang bahwa globalisme ekonomi tidak lebih dari kepentingan negara-negara maju untuk menguasai bahan mentah dan pasar di negara berkembang, dan menegakkan imperium global dengan bersandarkan pada praktek-praktek neokolonisasi ekonomi yang mengarah pada makin kukuhnya korporatokrasi.

Menjelang akhir hidupnya, Mubyarto makin merisaukan keterjajahan ekonomi Indonesia, yang dikajinya juga melalui konsep “Derajat Penghisapan”, dan puncaknya adalah gerakan intelektualnya melalui Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep-UGM) yang –mungkin- menjadi satu-satunya pusat studi di Indonesia yang bersuara keras dan ilmiah menolak rencana kebijakan pemerintah SBY-JK untuk menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005.

Jejak pemikiran khas Mubyarto juga dapat ditemukan dalam usaha kerasnya mengembangkan ilmu dan pendidikan ekonomi alternatif yang berpijak pada sistem nilai, sosial-budaya, dan kehidupan ekonomi riil masyarakat Indonesia. Mubyarto berpandangan bahwa manusia memiliki keinginan kuat untuk berkehidupan dengan sesama dan berbuat sesuai nilai-nilai moral yang disepakati bersama, sehingga ilmu ekonomi perlu lebih mengkaji aspek-aspek manusia sebagai *homo socius* dan *homo ethicus*.

Menurutnya, ilmu ekonomi tidaklah bebas nilai, sehingga ilmu ekonomi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya didasarkan pada permasalahan dan kondisi ekonomi riil, serta sistem nilai dan sosial-budaya bangsa Indonesia, yang kini banyak dikenal sebagai ilmu ekonomi kelembagaan. Berbagai permasalahan ekonomi bangsa menurutnya tidak akan dapat dipecahkan sekedar menggunakan alat-alat analisis ekonomi *an-sich*, tetapi hendaknya dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Oleh karenanya, ia menganjurkan pendekatan multidisiplin melalui pengembangan sosiologi ekonomi, sejarah ekonomi, antropologi ekonomi, dan ekonomi politik.

Pendidikan ekonomi menurutnya harus diupayakan untuk mendekatkan peserta didik pada berbagai permasalahan nyata yang dihadapi oleh pelaku ekonomi –khususnya ekonomi rakyat- di Indonesia. Pendidikan ekonomi hendaknya membuat peserta didik dapat memahami cita-cita ekonomi yang terkandung dalam konstitusi sebagai refleksi kesejarahan dan pijakan untuk membangun masa depan bangsa. Model pendidikan yang sesuai adalah model pendidikan hadap masalah (problem-posing education) yang diperkuat dengan kajian lapangan (induktif-empirik).

Dalam pandangan Mubyarto, ilmu dan pendidikan ekonomi yang diajarkan di Indonesia keliru, karena sebagian besar hanya bertumpu pada teks-teks ekonomi Neoklasik Barat, yang tidak selalu sesuai dengan sejarah, ideologi, sistem nilai, dan sosial-budaya bangsa Indonesia. Menurutnya ilmu ekonomi cenderung hanya diajarkan secara deduktif, monodisiplin, dan positivistik, sehingga mengalami keterputusan dengan cita-cita ekonomi yang diperjuangkan para pendiri bangsa dan terkamktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Kekeliruan paradigmatik tersebut menurutnya adalah akibat dari pikiran-pikiran bangsa Indonesia yang terhegemoni oleh paham-paham asing yang bersembunyi di balik globalisme-neoliberal dan penetrasi kepentingan korporasi global yang makin instensif ke segenap ranah perekonomian nasional, termasuk ke lembaga-lembaga pendidikan.

Lebih lanjut ia menganjurkan perlunya dikembangkan ilmu ekonomi alternatif yang lebih sesuai dengan ideologi bangsa. Oleh karenanya, Mubyarto menyerukan dilakukannya “Revolusi Pendidikan Ekonomi” melalui pengembangan ilmu ekonomi Pancasila, di seluruh perguruan tinggi dan sekolah lanjutan di Indonesia. Upaya ini makin diseriusnya setelah pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM yang di antaranya menyelenggarakan Lokakarya Pembaruan Pendidikan Ekonomi di Sekolah Lanjutan pada tahun 2004 dan Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila (KEEP) pada tahun 2005 di UGM.

Demikian, pemikiran Mubyarto selalu aktual dalam menjawab dan menemukan solusi bagi persoalan ekonomi kerakyatan Indonesia sampai dengan sekarang. Maka dari itu, melanjutkan pemikiran Mubyarto di Indonesia adalah usaha terus-menerus untuk mengembangkan sistem, ilmu, dan pendidikan ekonomi khas Indonesia. Pondasinya sudah diletakkan para pendiri bangsa, diteruskan Mubyarto, dan tibalah bagi kita semua untuk meneruskannya hingga tegak menjulang ke angkasa.